

ANALISIS NILAI KARAKTER ORMAS NU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Ascosenda Ika Rizqi¹⁾, Sapriya²⁾, Aim Abdulkarim³⁾, Dadang Sundawa⁴⁾

¹Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email: senda.air@gmail.com

²Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email: sapriya@upi.edu

³Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email: aimabdulkarim@upi.edu

⁴Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email: dadangsundawa@upi.edu

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk kehidupan beragama dalam bentuk Aswaja yang telah mengakar di kalangan warga ormas Nahdlatul Ulama sebagai nilai karakter organisasi kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian etnografi dimana etnografi dapat menganalisis suatu kelompok sosial, perilaku dan bahasa. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pasuruan Jawa Timur yang merupakan salah satu basis Nahdlatul Ulama terbesar yang dianut oleh masyarakat daerah Pasuruan pada umumnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep Pendidikan Kewarganegaraan meliputi nilai-nilai Tawassuth, Fikrah Ishlahiyyah, I'tidal, Tawazun, Tasamuih, Fikrah Tasamuihiyah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Fikrah Tathawwuriyah, Fikrah Tawassuthiyah dan Fikrah Manhajiyah.

Kata Kunci: Nilai-Nilai Karakter; Pendidikan Kewarganegaraan.

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the religious form of religious life in the form of Aswaja which has taken root among members of the Nahdlatul Ulama mass organization as a character value of the community organization. This study uses ethnographic research where ethnography can analyze a social group, behavior and language. The research location was carried out in the City of Pasuruan, East Java, which is one of the largest Nahdlatul Ulama bases that is embraced by the people of the Pasuruan region in general. The results of this study are in accordance with the concept of Citizenship Education including the values of Tawassuth, Fikrah Ishlahiyyah, I'tidal, Tawazun, Tasamuih, Fikrah Tasamuihiyah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Fikrah Tathawwuriyah, Fikrah Tawassuthiyah and Fikrah Manhajiyah.

Keywords: Character Values; Citizenship Education.

PENDAHULUAN

Berangkat dari setiap Problematika Indonesia sekarang yang lebih mengarah kepada tatanan dimana tidak sejalan dengan nilai-nilai kehidupan dalam berkewarganegaraan, seperti: tidak siapnya sistem Pendidikan karena kurikulum selalu berubah, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan hukum, banyaknya pelanggaran seperti KKN, pencemaran lingkungan, timbulnya disrespect terhadap budaya bangsa, adanya ujaran kebencian terhadap suku bangsa tertentu terutama melalui media sosial, hingga

bentrokan antar organisasi masyarakat yang mempertahankan eksistensinya tanpa mempedulikan kepentingan bersama, Permasalahan tersebut terjadi akibat lemahnya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Penelitian Khasri (2021) menjelaskan bahwa pemberitaan hoax di kalangan masyarakat diakibatkan karena lemahnya daya literasi digital terhadap masyarakat Indonesia. Ayualatha (2021) dalam penelitiannya menegaskan bahwa kurangnya modal sosial dapat menimbulkan disfungsi sosial dan disorganisasi sehingga

menyebabkan kurangnya kemampuan masyarakat dalam membaca peluang. Kusumawardani (2021) juga menjelaskan bahwa banyaknya perilaku yang tidak sesuai norma, tidak menghargai budaya bangsa, lemahnya sikap kebhinekaan serta semangat gotong royong berdampak pada lemahnya moral dan akhlak yang diakibatkan kemajuan teknologi.

Problematika tersebut sangat menarik jika dikaitkan dengan berbagai macam teori-teori pendidikan kewarganegaraan yang bersifat multifaset, dimana pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diletakkan dalam kerangka pendidikan formal namun juga diletakkan dalam kerangka fenomena sosial dalam kehidupan sehari-hari atau yang dikenal sebagai *civic engagement*.

Branson (1999:8) menjelaskan bahwa di era globalisasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus mengembangkan *civic competence* diantaranya: *civic knowledge*, *civic skill* dan *civic disposition*. Membicarakan selain *civic competence* diatas, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terbagi menjadi beberapa bidang diantaranya *civic engagement* atau yang dikenal sebagai PKn Kemasyarakatan, dalam pandangan American Psychologist Association (2012) mengartikan *civic engagement* sebagai "*Individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern*" artinya pelibatan warga negara merupakan langkah mandiri serta kolektif dengan tujuan identifikasi permasalahan.

Pembahasan lain PKn di masyarakat dapat melalui PKn Komunitas atau disebut sebagai *Community Civic* yang identik dengan implementasi organisasi atau komunitas dan kewarganegaraan dengan Kebhinnekaan dan tujuan mencapai keadilan serta kesejahteraan sosial sesuai dengan Pancasila.

Community Civic dikonstruksikan sebagai tatanan sosial dengan tujuan sesuai dengan nilai Pancasila. *Community Civic* memiliki karakter yang tidak bebas nilai

kewarganegaraan, secara khusus dalam konteks komunitas dapat mendorong warga negara muda sebagai pelopor kemandirian bangsa. *Community Civic* diharapkan dapat menjadi penyeimbang dalam masyarakat agar tercipta kedamaian seperti yang dijelaskan oleh Wahyudi dkk (2020:475) bahwa "*the community civic education can be developed as a mission to create conditions of peace in the community through community development and empowerment programs so that positive peace*".

Kusumawardani (2021) juga menjelaskan bahwa banyaknya perilaku yang tidak sesuai norma, tidak menghargai budaya bangsa, lemahnya sikap kebhinekaan serta semangat gotong royong berdampak pada lemahnya moral dan akhlak yang diakibatkan kemajuan teknologi. Melihat beberapa permasalahan yang ada di Indonesia terutama di era covid-19 saat ini peran organisasi masyarakat (ormas) sangat di perlukan dalam membantu tugas pemerintah daerah sebagai *feeder* masyarakat.

Peran organisasi masyarakat (ormas) diperlukan karena dapat membantu menjaga kedaulatan negara secara utuh, hal tersebut berkaitan dengan rasa fundamental manusia yaitu: hak untuk berkumpul dan berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*) Nesbit dalam Fauzi (2018:55) menegaskan bahwa "*dehumanisme* dalam sendi kehidupan juga banyak di pengaruhi oleh kemajuan zaman dan teknologi yang mengatur kehidupan manusia sehingga terjadi kehampaan batin, spiritual dan Nurani". Capra (2000:3) menambahkan bahwa "krisis dehumanisme tersebut disebabkan karena krisis global yang bersifat multi-dimensional hingga menyentuh sisi kehidupan manusia".

Organisasi masyarakat (ormas) yang dimaksud, berada di Pasuruan dimana wilayah tersebut terkenal sebagai kota santri karena memiliki banyak sekali

pesantren, selain itu Pasuruan merupakan basis ormas Nahdatul Ulama (NU) dimana nilai-nilai ke-NU-an sangat melekat di masyarakat hingga saat ini, secara konotasi hal tersebut dapat dicontohkan melalui peristiwa politik dalam negeri yang pernah terjadi dimana mengakibatkan bentrokan antar masyarakat yang mengatasnamakan agama, hingga detik ini pun dapat diibaratkan seperti api dalam sekam, Bustami (2009:20) memberikan contoh bahwa “Pasuruan merupakan tempat terjadinya kerusuhan politik di Jawa Timur pasca dijatuhkannya pemerintahan Abdurrahman Wahid pada tahun 2004 lalu”. Organisasi Masyarakat NU inilah yang menjadi sasaran pada tulisan artikel ini dimana nilai-nilai karakter ormas menjadi fokus tertentu dalam penelitian yang dimaksud.

Pembahasan mengenai ormas jika direlevansikan dengan pendidikan kewarganegaraan (PKn) jelas memiliki misi membentuk masyarakat yang terampil, cerdas dan menjamin keberlangsungan negara, selain itu PKn bersifat multifacet lintas bidang keilmuan yang mencakup banyak keilmuan, diantaranya: Politik, Hukum, Pendidikan, Psikologi, dan disiplin ilmu lain yang mendukung pembentukan masyarakat yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menekankan pada pembentukan manusia yang beragama, cerdas, terampil, demokratis dan sejahtera serta cinta tanah air serta dapat menjaga Indonesia dalam pergaulan antar bangsa.

Relevansi pembahasan antara Organisasi dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) juga terdapat dalam teori *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) jika dijelaskan secara sederhana menurut Organ (1988) bahwa “OCB merupakan perilaku inisiatif seseorang, tidak terkait dengan sistem untung rugi sebuah organisasi, tetapi secara agregat meningkatkan efektivitas organisasi”. Takeuchi (2015) juga menegaskan bahwa “selalu mendapatkan perhatian dari akademisi terkait dengan perilaku yang berdampak

kepada organisasi”. Putra (2021:494) menambahkan bahwa “OCB diharapkan mampu mengorganisir secara baik dengan cara memberikan dukungan maksimal baik dalam peningkatan kesejahteraan maupun memberikan dukungan pengembangan karir guna pencapaian tujuan organisasi yang lebih baik lagi”.

Relevansi lain mengenai pembahasan antara Organisasi dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) juga terdapat dalam teori pengembangan masyarakat yang di kemas melalui Pendidikan Non Formal dimana menurut Tohir (2019:96) bahwa “pengembangan masyarakat harus dilakukan serentak antara organisasi pemerintah, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, *public figure* dan masyarakat itu sendiri”. Somantri dan Udin (2017:58) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan terutama dalam lingkup Pendidikan Non Formal selama ini belum mencapai sasaran optimal.

Memasuki pembelajaran abad 21 yang mana ada sinergitas antara keterampilan, kecakapan, pengetahuan, sikap dan penguasaan teknologi pada akhirnya melahirkan keterampilan berpikir lebih tinggi sangat diperlukan terutama dalam hal berorganisasi. Hal lain yang mendukung dalam berorganisasi ialah memiliki kemampuan dalam bekerjasama, berkelompok serta beradaptasi secara produktif dengan yang lain, merupakan *soft skills* yang diperlukan guna menjalankan fungsi sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (*people skills*) serta mempunyai tanggung jawab sosial atau yang disebut dengan *Social Responsibility*.

Assya'bani (2022:556) menyatakan bahwa prinsip dari pembelajaran abad 21 menitik beratkan pada kemampuan siswa dalam pencarian ilmu dari berbagai sumber terkait, merumuskan permasalahan, berpikir analisis dan kerjasama secara sinergi dalam menyelesaikan masalah. Artinya dalam suatu organisasi masyarakat pun anggotanya juga harus di tuntut untuk

cakap dalam menguasai iptek serta harus mampu berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan di lapangan. Adapun organisasi masyarakat dimaksud adalah NU (Nahdlatul Ulama) yang seharusnya menjadi *feeder* bagi masyarakat, namun dalam kenyataannya NU (Nahdlatul Ulama) masih belum menampakkan kelebihan sebagai sebuah ormas. Secara umum NU (Nahdlatul Ulama) tidak banyak di miliki oleh suatu wilayah di Indonesia, walaupun kehadirannya sangat dibutuhkan di saat tertentu, namun NU (Nahdlatul Ulama) merupakan ormas besar di wilayah Pasuruan, Jawa Timur yang memiliki anggota dari berbagai macam kalangan, bergerak secara dinamis, memiliki program kerja yang jelas, memiliki tatanan organisasi serta diakui oleh pemerintah dan masyarakat, selain itu paradigma mengenai NU (Nahdlatul Ulama) terkait dengan sikap kepemimpinan yang tidak mau di kritik menjadi permasalahan tersendiri dan adanya aspek hybrida terutama pada sosok kyai yang menjadi salah satu panutan dalam sebuah organisasi, jika sesosok tersebut salah dalam memberikan keputusan akan berdampak sampai ke grassroot, begitu pula sebaliknya, inilah yang menjadi permasalahan di tubuh NU sendiri khususnya di wilayah Kota Pasuruan

Berangkat dari pemikiran diatas maka penulisan artikel ini ingin melihat bagaimanakah nilai karakter yang dikembangkan dalam organisasi Nahdlatul Ulama utamanya di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur, Apalagi melihat perubahan ormas NU secara pemikiran dari Islam Nusantara menuju Islam yang peradaban.

Rumusan PKn seperti yang dijelaskan oleh Wahab dan Sapriya (2011:311–312) meliputi: Ilmu Pengetahuan, Keterampilan Intelektual, sikap dan Keterampilan sosial. Membahas mengenai keterampilan sosial juga ditambahkan mengenai salah satu identifikasi menjadi masyarakat yang baik mampu memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai individu,

mampu mengatasi *problem solving* baik secara individu maupun di masyarakat secara cerdas sesuai dengan kapabilitasnya (*social sensitive, socially responsible and social intelligence*).

Ruang lingkup PKn menurut Chreshore dalam Sapriya (2011) merupakan bidang kajian lintas keilmuan, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mempunyai objek kajian ilmu politik, yang dikhususkan pada konsep demokrasi demi kepentingan hak dan kewajiban. Barr, Bart dan Shemis dalam sapriya (2011) juga menjelaskan bahwa PKn merupakan salah satu keilmuan dari *social studies* yaitu transmisi kewarganegaraan yang sejauh ini juga berkembang pesat melalui konsep keilmuan *citizenship education*.

Berdasarkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, maka erat kaitannya dengan dalam hal membangun kesadaran warganegara melalui keterampilan memecahkan masalah; kemampuan merencanakan terhadap nilai kehidupan yang efektif; peran wakil rakyat, pakar dan spesialis; serta kebanggaan terhadap prestasi bangsa. Selain itu internalisasi wawasan kebangsaan, sikap serta perilaku cinta tanah air yang bersendi kepada budaya bangsa. Kualitas masyarakat ditentukan melalui ketulusan hidup berbangsa dan bernegara serta penguasaan iptek. Salah satu faktor penting guna menjadi masyarakat yang baik ialah sadar akan hak dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam segala keputusan yang diambilnya, selain itu faktor penting yang lain adalah sebuah kompetensi, adapun kemampuan yang diharapkan dari PKn adalah: (1) Terbentuknya kerangka berpikir dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) Menumbuhkan loyalitas kebangsaan sehingga rela berkorban demi tegaknya keutuhan bangsa.

Cogan (1997) menjelaskan ada 8 karakteristik warga negara yang sampai saat ini masih digunakan utamanya sebagai syarat menjadi warga negara global,

yaitu: (1) *ability to look at and approach problems as a member of global society*; (2) *ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's roles/duties within society*; (3) *ability to understand, accept and tolerate cultural differences*; (4) *capacity to think in a critical and systemic way*; (5) *willingness to resolve conflict in a non-violent manner*; (6) *willingness to change one's lifestyle and consumption habits to protect the environment*; (7) *ability to be sensitive towards and to defend human rights*; (8) *willingness and ability to participate in politics at local, national and international levels*. Relevansi antara teori dari Cogan tersebut dengan organisasi masyarakat juga terdapat pada poin kedua yaitu mampu berkolaborasi serta bertanggung jawab kepada diri dalam perannya di masyarakat, serta poin ketiga yaitu mampu memahami dan menerima konsep perbedaan budaya.

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) terutama di Indonesia memiliki sifat khusus yaitu mewujudkan toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan serta memelihara kestabilan nasional. Di tinjau dari segi sejarah PKn yang termuat dalam pembelajaran formal baik di sekolah maupun Pendidikan tinggi di munculkan tahun 1957 dengan nama kewarganegaraan dan tentunya berganti-ganti nama serta kurikulum yang memuatnya hingga pada akhirnya di era new reformasi ini bertahan dengan nama Pendidikan kewarganegaraan yang jelas memuat revitalisasi dan restrukturisasi kurikulum dan materi pembelajaran.

Prinsip dari PKn dalam domain nilai menurut Somantri dan Udin (2017:82) adalah "*value is neither taught nor cought, it is learned*", yang memiliki arti nilai bukanlah hal yang diajarkan melalui diri sendiri melainkan dicerna melalui proses belajar. Manusia pada dasarnya lahir, hidup dan mati Kembali kepada tuhan dalam lingkungannya, termasuk proses

pemberdayaan, pendewasaan maupun pembudayaan tidak berlangsung begitu saja melainkan melalui proses dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu pembelajaran termasuk di dalamnya pembelajaran tentang value development harus berlangsung di dalam lingkungannya.

Membicarakan PKn dalam domain nilai yang tercermin dalam Pancasila merupakan esensi kepribadian bangsa Indonesia dan karakter masyarakat tersebut, sehingga masyarakat mengakui dan menerima sebagai pemilik karakter dari nilai-nilai Pancasila tersebut.

Nilai-nilai pancasila tersebut terurai melalui *Community Civic* yang dijelaskan oleh Good (1959) dimana merupakan salah satu studi Pendidikan kewarganegaraan yang menjelaskan harmonisasi manusia dengan sekitarnya serta pemahaman sebagai perkumpulan yang mengasah dirinya. *Community Civics* juga di pelopori oleh Dunn (1907) guna membelajarkan peserta didik dengan mengajarkan bagaimana mengelola lingkungan sehari-hari baik dalam lingkup lokal maupun lingkup internasional.

Meninjau dari partisipasi kewarganegaraan Ehrlich dan AAC&U (2000) dalam Somantri dan Udin menjelaskan melalui sebuah parameter terkait dengan sebuah komunitas dan budaya, bahwa komunitas harus menunjukkan bukti penyesuaian sikap dan keyakinan bekerja dan belajar dari keberagaman komunitas dan budaya serta mendorong masyarakat yang lain, di sisi yang lain juga harus menunjukkan sikap dan kepercayaan sebagai individu yang memiliki sudut pandang yang diperoleh dari keberagaman komunitas dan budaya.

Mawarti dan Sundawa (2016:70) menjelaskan bahwa menurutnya *Community Civic* di Indonesia lebih mengarah kepada warga negara yang ditandai dengan kemajuan suatu ormas dengan pencapaian kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Community Civic* terbentuk

melalui tatanan masyarakat yang terbalut dalam komunitas non pemerintahan dengan tujuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Wahab dan Sapriya (2011) serta Winataputra (2012) juga menegaskan bahwa *Community Civic* tidak bebas akan nilai kewarganegaraan, namun melalui komunitas ini diharapkan menjadi pelopor kemadiriian bangsa.

Selain itu tinjauan *Community Civic* tidak hanya selalu terbatas kepada hal positif tetapi juga merujuk ke hal negatif terkait penggunaan obat terlarang dalam hal ini alkohol oleh suatu komunitas, sebagaimana dalam penelitian Murphy (2014) yang menjelaskan bahwa *The finding that community-level civic participation is associated with increased odds of hazardous alcohol consumption seems to contradict evidence from other regions that links civic participation to improvements in health and should be investigated further*. Sedangkan Bankoff (2012) juga menambahkan terkait dengan karakteristik *Community Civic* diantaranya: (1) keterlibatan aktif dalam urusan publik; (2) memiliki rasa solidaritas, kepercayaan, dan toleransi yang kuat antara anggota; (3) kesetaraan yang mengikat melalui hubungan horizontal yang timbal balik; dan (4) komitmen terhadap kerja sama yang diungkapkan melalui semangat asosiasi lokal akan sosial

Dunn (2004) menjelaskan bahwa *Community Civics* sebagai sosiologi dasar yang memberikan elemen sosial sekaligus memberikan sudut pandang mengenai pemerintahan dan kewarganegaraan melalui kehidupan komunitas kewarganegaraan baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Saxe (1991:22) dan Reuben (1997) menegaskan bahwa konsep *Community Civics* Dunn dapat meminimalisir perubahan konsep definisi kewarganegaraan sebagai sebuah konsep politik seperti formal *“political participation and particularly voting”* menjadi sebuah sosio

kultural dengan konsep *“the cultural ideal of citizenship in line with the legal status... in the public sphere”*. Selain itu keterlibatan sebuah komunitas juga dianggap sebagai sebuah definisi pro-sosial seperti yang diungkapkan oleh Flanagan and Sherrod (1998) *The term “civic engagement” is generally defined as a prosocial intention or behaviour which is targeted at the community or societal level*, serta sebuah respon sosial, nilai sosial dan aksi dari warga negara serta menjadi sebuah kewajiban warga negara hal ini di perkuat oleh pendapat (Rosi 2016; crocetti 2015; Varela 2018; and Metzger 2010) bahwa

Civic engagement is a sense of responsibility and a personal commitment. Social responsibility is a set of social values, which represent an individual's respect for the community or concern for the welfare of others in society. Social responsibility is often thought of as a person's sense of 'civic duty' or 'responsibility' towards the community. The term civic action, refers to the degree to which a person actively engages in prosocial behavior with the aim of helping society.

Keterlibatan suatu komunitas dalam masyarakat juga disebut sebagai sebuah Tindakan sukarela tanpa adanya paksaan guna mencapai suatu tujuan sosial, Zukin (2006) juga menegaskan bahwa *Civic engagement refers to take part in volunteer activities through working with others within social organizations or communities to achieve the social good*, sehingga peran dari sebuah komunitas sangat berdampak kepada kemajuan sebuah wilayah, sebagai contoh di kota-kota besar Indonesia juga sangat terlihat bagaimana peran masyarakat melalui organisasi masyarakat atau komunitas sangat terlihat aktualisasinya dalam menjaga keutuhan sebuah wilayah, sehingga tumbuhlah rasa tanggung jawab masyarakat terhadap wilayah tersebut.

Salah satu aspek PKn yaitu *Community Civic* terutama di Indonesia sejauh ini belum

tersentuh baik dari pemerintah maupun dari warga negaranya, hal ini dibuktikan bahwa belum tepatnya penjelasan mengenai *Community Civic* yang selama ini telah berkembang dalam sebuah pembelajaran PKn hal tersebut pernah di jelaskan oleh Hidayah (2020) bahwa penjelasan mengenai *civic community* belum ada yang pas dan dapat menggambarkan penyampaian pesan dari *civic community*, namun Carnegie Foundation (2014) dan Robin (1996) sepakat bahwa *Community Civic* yang terdapat dalam universitas satu kesatuan yang di koordinasikan untuk mencapai tujuan yang sama.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada tataran organisasi masyarakat (ormas) yang seperti sudah dibahas merupakan pembelajaran yang menarik dan bersifat *multifacet*, artinya pembelajaran PKn terutama melalui materi-materinya dapat di letakkan di segala lini, mulai dari Pendidikan formal, Pendidikan informal maupun Pendidikan nonformal. PKn dalam Pendidikan formal melalui muatan pembelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi yang sejauh ini sudah di dapat oleh peserta didik, hal ini sesuai dengan pendapat al hakim (2012) bahwa PKn merupakan teori pendidikan dengan fungsi untuk membina kesadaran warga negara serta melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan jiwa dan nilai konstitusi yang berlaku. Secara yuridis juga sudah termuat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dan Undang-undang Pendidikan tinggi nomor 12 tahun 2012 dimana Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu pembelajaran maupun mata kuliah wajib kurikulum.

Pendidikan kewarganegaraan jika diletakkan dalam organisasi masyarakat relevansinya akan termuat pada *civic skill* dan *civic competence* dari suatu masyarakat tersebut, yaitu kemampuan dari anggota suatu organisasi masyarakat dalam

menjalankan roda organisasi, membuat suatu kegiatan yang bermanfaat bagi organisasi dan masyarakat, membuat suatu keputusan berdasarkan hasil kesepakatan bersama, berkolaborasi dengan mitra kerja organisasi, melaksanakan komunikasi dengan mitra kerja organisasi dan lain sebagainya, hal tersebut tentunya sesuai dengan pembelajaran abad 21 dan *society 5.0* di mana syarat kecakapan warga negara saat ini melalui 4C (*creativity, communication, collaboration, critical thinking*) serta bagaimana suatu anggota organisasi masyarakat dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) juga di tuntut untuk menguasai teknologi, menguasai Bahasa asing serta kebutuhan yang di inginkan oleh masyarakat luas pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini difokuskan kepada bagaimana menganalisis nilai-nilai dalam ormas NU di wilayah kota pasuruan. Adapun metode Penelitian ini dibahas dari sudut pandang etnografi guna menganalisis suatu kelompok beserta perilaku dalam kehidupan kesehariannya. Sasaran yang menjadi fokus penelitian ini tentunya stakeholder yang ada di dalam ormas NU seperti: ketua harian, anggota NU dan tokoh NU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian mengenai nilai-nilai ke-NU-an yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kota pasuruan tentunya menghasilkan suatu konsep yang berbeda dari wilayah lain utamanya di jawa timur. Ormas NU di wilayah kota pasuruan dirasa lebih beragam dari segi kegiatan bermasyarakatnya.

Adapun hasil analisis konsep nilai-nilai ke-NU-an di wilayah kota pasuruan dapat dibahas melalui konsep besar bernama Fikrah Nahdliyyah. Fikrah Nahdliyyah adalah kerangka berpikir yang didasarkan kepada ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah yang merupakan landasan berpikir NU (khittah nahdliyyah) untuk menentukan arah perjuangan guna mewujudkan kebaikan

umat (ishlahul ummah). Adapun penerapan nilai-nilai ke-NU-an dalam kehidupan bermasyarakat diimplementasikan:

Nilai-nilai Tawassuth (Pertengahan) dan Fikrah Ishlahiyyah (pola pikir reformatif) dalam penerapan kehidupan bermasyarakat adalah dengan melakukan komunikasi terhadap sesama anggota NU dan anggota ormas lainnya agar tetap terjalin dengan baik walaupun memang berbeda ormas tetapi tetap pada satu pemikiran terhadap nusa dan bangsa utamanya di wilayah kota Pasuruan, serta bagaimana peran pondok pesantren (ponpes) beserta para santri menerapkan nilai keislaman dengan mengutamakan rukun islam dan rukun iman, serta mempelajari kitab-kitab, apalagi di tinjau dari sejarah salah satu ponpes di wilayah Pasuruan yaitu Ponpes Sidogiri yang dapat dikatakan sebagai ponpes bersejarah karena di waktu perang 10 November 1945 juga mengirimkan santrinya guna berjihad membantu mempertahankan NKRI di Kota Surabaya. Pola pikir seperti inilah yang sejalan dengan Pendidikan Demokrasi di Indonesia dimana selalu mengedepankan kepentingan Bersama daripada kepentingan individu. Dalam penelitian Munandar dan Kubro (2021:47) juga menjelaskan bahwa “Konsep ini bertujuan untuk mengakomodir Islam reformis dan memelihara hubungan antar manusia. Sikap dan pemikiran terhadap Islam moderat (tawassut) juga merupakan ajaran yang dipraktikkan”.

Nilai-nilai I'tidal (Tegak Lurus) dan Nilai-nilai Tawazun (Keseimbangan) dalam penerapan kehidupan bermasyarakat adalah dengan melakukan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Sebagai contoh tidak menolak dan masih terus melestarikan nilai-nilai haul dan praonan yang sampai saat ini tetap berjalan di wilayah Pasuruan sebagaimana mestinya. Kegiatan lain menghadiri haul kyai hamid yang dilaksanakan rutin setiap tahun, selain memohon keberkahan yang ada di

dunia juga memohon keberkahan akhirat, hal ini sesuai dengan tatanan kenegaraan Republik Indonesia yang tidak harus menjadi negara yang sesuai bentuknya yaitu negara islam namun dengan negara kesatuan hari ini bagaimana agama dan negara hidup secara berdampingan. Salah satu nilai kebudayaan yang diterapkan di Pasuruan inilah yang mencerminkan dari *Community Civic* itu sendiri.

Nilai-nilai Tasamuih (Toleran) dan Nilai-nilai Fikrah Tasamuiyah (pola pikir toleran) dalam penerapan kehidupan bermasyarakat adalah dengan selalu menghargai setiap insan, selalu menghormati keputusan orang lain, termasuk dari agama keyakinan yang memang hadir di tengah masyarakat saat ini, termasuk tradisi haul kyai hamid, praonan yang dilaksanakan seminggu setelah lebaran serta tradisi slametan yang sampai detik ini terus ada di wilayah Pasuruan. Selain itu penerapan kehidupan bermasyarakat adalah dengan NU hidup berdampingan dengan masyarakat walau beda aqidah, utamanya di wilayah Pasuruan terdapat masyarakat aliran kepercayaan dan ada masyarakat suku tengger dengan tradisi uniknya, disinilah NU tetap memberikan toleransi selama tidak menyinggung satu sama lain. Melalui PKn nilai-nilai Tasamuih tersebut sama halnya dengan nilai-nilai PKn yang mengedepankan toleransi baik dalam beragama maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artikel yang di tulis Haris (2020:312) nilai-nilai Tasamuih juga disebutkan bahwa “Nahdlatul Ulama untuk merespons berbagai perubahan di lingkungannya, dan sangat toleran terhadap berbagai perbedaan yang berkembang dalam masyarakat plural seperti di Indonesia, tanpa terjebak dalam ekstrem kiri dan kanan yang secara fundamen sering kali merusak dimensi-dimensi solidaritas sosial dan kemanusiaan di Indonesia”.

Nilai-nilai Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Menyeru dan Berbuat baik) dan nilai-nilai Fikrah Tathawwuriyah (pola pikir

dinamis) dalam penerapan kehidupan bermasyarakat adalah dengan Selalu membantu masyarakat yang membutuhkan, baik melalui perekonomian dalam hal ini koperasi, Pendidikan dalam hal ini sekolah, politik dalam hal ini partai politik NU, menghormati kyai yang ada di wilayah Pasuruan utamanya, serta tidak terhasut dengan berita yang ada saat ini, tetap berpikir majemuk, ke depan demi bangsa dan negara apalagi NU sudah berusia 1 abad yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di sidoarjo, Jawa Timur. Konsep Good Citizen adalah mengajarkan masyarakat menjadi warga negara yang baik, hal tersebut juga tertuang dalam nilai-nilai Amar Ma'ruf Nahi Munkar, sehingga dengan harapan jika telah menjadi warga negara yang baik dapat berpikir dinamis atau menjadi masyarakat dengan tipe generator. Hasil penelitian Arifin dan Syaiful (2019:251) terkait nilai Fikrah Tathawwuriyah dijelaskan bahwa "Nahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan".

Nilai-nilai Fikrah Tawassuthiyah (pola pikir moderat) dan nilai-nilai Fikrah Manhajiyah (pola pikir metodologis) dalam penerapan kehidupan bermasyarakat adalah dengan berpikir modern bahwa NU di tinjau dari sejarah bahwa KH Hasyim Ashari adalah salah satunya sebagai pemikir Pancasila yang dalam hal ini juga di tinjau dari sejarahnya bagaimana NU bentrok dengan Masyumi terkait keberadaan Pancasila itu sendiri, hal inilah yang menempatkan NU di era saat ini bagaimana mencetuskan dari Islam Nusantara menjadi Islam yang peradaban sesuai dengan kemajuan bangsa Indonesia hari ini. Selain itu bagaimana NU juga berperan dalam menangkal paham radikalisme melalui pemahaman agama dan berbangsa bernegara. Terkait dengan PKn yang PKn yang diharapkan menjadi masyarakat yang memiliki *Civic competence*. Dalam penelitian Fuadi (2022:15) menjelaskan bahwa "karakter

masyarakat tidak ekstrem di dalam melihat berbagai macam persoalan dan selalu mengambil jalan tengah dari berbagai macam titik ekstrim baik dalam pemikiran maupun titik ekstrim dalam pergerakan".

SIMPULAN

Nilai-nilai Tawassuth (Pertengahan) dan Fikrah Ishlahiyah (pola pikir reformatif), Nilai-nilai I'tidal (Tegak Lurus) dan Nilai-nilai Tawazun (Keseimbangan), Nilai-nilai Tasamuih (Toleran) dan Nilai-nilai Fikrah Tasamuiyah (pola pikir toleran), Nilai-nilai Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Menyeru dan Berbuat baik) dan nilai-nilai Fikrah Tathawwuriyah (pola pikir dinamis), Nilai-nilai Fikrah Tawassuthiyah (pola pikir moderat) dan nilai-nilai Fikrah Manhajiyah (pola pikir metodologis) dalam kehidupan bermasyarakat sudah sejalan dengan konsep Pendidikan kewarganegaraan terutama nilai-nilai PKn, *Community Civic* dan *Civic competence*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., & Ach. Syaiful. (2019). Urgensi Mata Kuliah Aswaja di Perguruan Tinggi Islam. *Jurnal Kariman*, 7(2), 239–254. <https://doi.org/10.52185/kariman.v7i2.117>
- Assya'bani, R., & Majdi, M. (2022). Pengembangan Model Pembelajaran Pasca Covid-19 Berdasarkan Pembelajaran Abad 21. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(2), 555. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.903>
- Branson, M.S (Eds). (1999). *Belajar Civic Education Dari Amerika. (Terjemahan Syarifudin, dkk)* Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial dan The Asia Foundation
- Bustami, Abdul Latif. (2009). *Kyai Politik Politik Kyai (Membedah Wacana Politik Kaum Tradisionalis)*. Malang: Pustaka Bayan.

- Capra, Fritjof. (2000). *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, terj. M. Thoyibi. Yogyakarta: Bentang.
- Cogan, J.J. (1997) *Multidimensional Citizenship: Educational Policy for the Twenty-first Century. Executive Summary Report of the Citizenship Education Policy Study*. Minneapolis, MN: University of Minnesota.
- Fuadi, M. A. (2022). Tradisi Pemikiran Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 21(1), 12. <https://doi.org/10.24014/af.v21i1.16692>
- Good, Carter Van. (1959). *Dictionary of education*. New York: McGraw-Hill.
- Haris, M. A. (2020). Pandangan dan Konsep Deradikalisasi Beragama Perspektif Nahdlatul Ulama (NU). *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(2), 305–318. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i2.156
- Khasri, M. R. K. (2021). *Pancasila Dalam Praksis Sosial: “Manusia Pancasila” Menjawab Permasalahan Masyarakat Digital*. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 86–97. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.5>
- Mawarti, R., & Sundawa, D. (2016). Peranan Civic Community Dalam Mendorong Pemuda Sebagai Pelopor Kemandirian Bangsa (Studi kasus pada komunitas “Pasukan Kresek” di Kabupaten Malang Jawa Timur). *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat*, 16(2), 63-84. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v16i2.934>
- Munandar, S. A., & Kubro, U. A. (2021). Tawassut Attitude Relevance Nahdlatul Ulama In Preventing Extremism. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 17(1), 45–59. <https://doi.org/10.23971/jsam.v17i1.2421>
- Organ, D. W. (1988). *Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome*. Lexington Books/ DC Heath and Com.
- Somantri, M. Numan dan Udin Saripudin Winataputra. (2017). *Disiplin Pendidikan Kewarganegaraan kultur akademis dan pedagogis*. Lab PKn UPI: Bandung
- Takeuchi, R. (2015). Too many motives? The interactive effects of multiple motives on organizational citizenship behavior. *Journal of Applied Psychology*, 100(4), 1239–1248. <https://doi.org/10.1037/apl0000001>
- Tohir, S. (2020). Pembangunan Masyarakat Sebagai Konsep Dakwah Dan Pembangunan Madinah Sebagai Contoh Community Development. *Jurnal Da’wah: Risalah Merintis, Da’wah Melanjutkan*, 2(01), 95–131. <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v2i01.46>
- Wahab, Azis dan Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta: Bandung